

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sehubungan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang saya dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015-2017 untuk setiap rasio yang dianalisis:

A. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur sebesar 6,86% dan Kabupaten Sikka sebesar 7,86%, walaupun Kab.Sumba Timur dan Kabupaten Sikka mendapatkan opini WTP dari BPK tetapi Kinerja keuangan Kab.Sumba Timur dan Kab.Sikka mendapatkan predikat sangat rendah karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 00,00%-10,00% saja.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini non-WTP dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terbaik yaitu Kota Kupang sebesar 15,53% sedangkan

Kabupaten Rote ndao menjadi daerah yang memiliki kemampuan Derajat Desentralisasi Fiskal terburuk yaitu sebesar 4,04%.

2) Rasio Kemandirian Keuangan

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur sebesar 8,45% dan Kab.Sikka sebesar 9,96%, walaupun Kab.Sumba Timur dan Kab.Sikka mendapatkan opini WTP dari BPK tetapi Kinerja keuangan Kabupaten Sumba Timur dan Kab.sikka mendapatkan predikat sangat baik karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 00,00% - 10,00% saja.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini non-WTP dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terbaik yaitu Kota Kupang sebesar 21,01% sedangkan Kabupaten Rote Ndao menjadi daerah yang memiliki kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah terburuk yaitu sebesar 4,76%.

3) Rasio efektivitas PAD

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur sebesar 80,89% dan Kab.Sikka sebesar 76,74%, walaupun Kab.Sumba Timur dan Kab.Sikka mendapatkan opini WTP dari BPK tetapi Kinerja keuangan

Kabupaten Sumba Timur dan Kab.sikka mendapatkan predikat kurang efektif dan tidak efektif karena skala interval Derajat Desentralisasi yang diperoleh antara 75% - 89% dan <75%.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini non-WTP dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD terbaik yaitu Kota Kupang sebesar 109,23% sedangkan Kabupaten Kupang menjadi daerah yang memiliki kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah terburuk yaitu sebesar 71,60%.

B. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur sebesar 88,61% dan Kab.Sikka sebesar 84,22%, walaupun Kab.Sumba Timur dan Kab.Sikka mendapatkan opini WTP dari BPK tetapi Kinerja keuangan dihitung berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja Daerah skala Kabupaten Sumba Timur dan Kab.sikka masih lebih tinggi dari pada Kabupaten lainnya.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini non-WTP dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja Daerah terbaik yaitu Kabupaten Sabu Raijua sebesar 78,15% sedangkan

Kabupaten Rote Ndao menjadi daerah yang memiliki Efisiensi Belanja Daerah terburuk yaitu sebesar 93,01%.

2) Rasio Keserasian Belanja Daerah

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur rasio belanja langsung sebesar 48,66% terhadap total belanja dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung sebesar 51,34% terhadap belanja dan Kab.Sikka rasio belanja langsung sebesar 39,43% terhadap total belanja dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung sebesar 60,57% terhadap belanja.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Kinerja Keuangan Daerah untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini non-WTP dengan menggunakan rasio ini, Kabuapten Sabu Raijua memiliki rata-rata belanja langsung sebesar 61,79% dan belanja tidak langsung sebesar 38,21% sedangkan keserasian belanja terburuk diperoleh oleh Kabupaten TTS dengan belanja langsung sebesar 35,19% dan belanja tidak langsung sebesar 64,8%.

C. Analisis Pembiayaan

1) Pertumbuhan SiLPA

a) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini WTP

Kinerja Keuangan Kab/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Sumba Timur dengan Rata-Rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.89.216.481.709 dan Kab.Sikka dengan Rata-Rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.99.545.655.613.

b) Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang beropini non-WTP

Kinerja Keuangan Daerah untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang mendapatkan opini non-WTP dengan menggunakan rasio ini, Kabupaten Kupang dengan Rata-Rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp.146.733.938.916 sedangkan Rata-Rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terendah diperoleh oleh Kabupaten sumba Tengah sebesar Rp.38.492.318.390.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT:

A. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan skala interval Derajat Desentralisasi, rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten di Provinsi NTT dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat sangat

rendah karena skala interval derajat desentralisasi yang diperoleh diantara 00,00%-10,00%. Sedangkan hanya Kota Kupang yang memiliki kemampuan daerah dengan predikat rendah dengan skala interval derajat desentralisasi sebesar 10,01%-20,00%. Hal ini menunjukkan bahwa, penyelenggaraan desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikatakan belum maksimal. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan menggali potensi-potensi baru atau memperluas objek-objek yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD daerahnya.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Presentase Kemandirian Keuangan Daerah, Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dikategorikan memperoleh kemampuan daerah dengan predikat sangat rendah karena presentase kemandirian keuangan yang diperoleh antara 0,00%-25,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikatakan belum mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya sehingga masih adanya ketergantungan yang besar terhadap bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi yang telah ada. Peningkatan PAD bisa dilakukan dengan cara melaksanakan

secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD.

3) Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan Presentase Efektivitas PAD, Rata-rata Rasio Efektivitas PAD 19 Kabupaten di Provinsi NTT dikategorikan tidak efektif karena presentase efektivitas PAD yang diperoleh kurang dari 100% dan Kab/Kota yang dikategorikan sangat efektif yaitu Kota Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Lembata karena presentase efektivitas PAD yang diperoleh lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan kepada 19 Kabupaten di Provinsi NTT bahwa harapan pemerintah daerah terhadap PAD yang dihasilkan sangat melampaui batas kemampuan PAD yang ada sehingga besarnya PAD yang dianggarkan terlalu besar sedangkan realisasi PAD yang diterima kecil serta belum adanya usaha yang optimal dari pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi PAD yang ada. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mengevaluasi kembali potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber PAD sebelum menetapkan dalam anggaran tahun berjalan.

B. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Rasio Efisiensi Belanja Daerah

Berdasarkan Presentase Efisiensi Belanja Daerah, Rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dikategorikan efisien karena presentase efisiensi belanja daerah yang diperoleh kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sudah efisien dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah ditetapkan sehingga realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ada. Akan tetapi, presentase yang diperoleh dapat dikatakan cukup efisien karena presentasinya masih diantara 80%-95%. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT diharapkan agar lebih menghemat dalam menggunakan anggaran belanja yang ada sehingga tidak terjadi pemborosan atau tidak efisien dalam penggunaan anggarannya. Peningkatan efisiensi belanja dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pengeluaran belanja terhadap program-program pemerintah yang dapat memberikan manfaat dan dianggap prioritas sehingga berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memotong anggaran perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan seminar karena kegiatan semacam ini tidak terlalu membawa dampak yang besar terhadap masyarakat sehingga perlu dikurangi.

2) Rasio Keserasian Belanja

Berdasarkan perhitungan dan analisis, Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT lebih didominasi untuk Belanja Tidak Langsung dibandingkan untuk Belanja Langsung. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT diharapkan agar lebih meningkatkan Belanja Langsung sebab belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output untuk pembanguna daerah.

C. Analisis Pembiayaan

1) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan Presentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dapat dikatakan baik karena setiap Kabupaten/Kota tidak mengalami Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran, Walaupun Tidak setiap tahun Kabupaten/Kota Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran meningkat. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sudah dapat menutup defisit anggaran yang sudah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, Filomena D.C. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2011*. Kupang: Kearsipan Fakultas ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2018. *BPK memberikan Opini terhadap LKPD Provinsi NTT TA.2017. (online)*
(<http://kupang.bpk.go.id/?p=6371>) diakses 5 April 2019.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*: Salemba Empat. Jakarta
- Bifel, Yosefa Maria Suciati. 2018. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Mataram: Kearsipan Universitas Mataram
- Fahmi, Irham. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*: Alfabeta. Bandung
- Fernandez, Elissa M. G. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009-2011*. Kupang: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*: Salemba Empat. Jakarta
- Kamaroellah, R. Agoes. Agustus, 2017. *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (online)
([https://www.researchgate.Net/Publication/318911140 Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah](https://www.researchgate.Net/Publication/318911140_Analisis_Tingkat_Kemampuan_Keuangan_Daerah_Dalam_mendukung_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah)) diakses tanggal 23 Maret 2019.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*: Penerbit Erlangga. Jakarta

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*: Penerbit ANDI. Yogyakarta

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*: Refika Aditama. Bandung

Oppier, Hermi. 2013 *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal Benchmark Volume 2 November 2003. (online)
([https://ejournal.unsrat.ac.id>viewFile](https://ejournal.unsrat.ac.id/viewFile)) diakses tanggal 12 Maret 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar

Pramita, Puput Rizky. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2013*. Yogyakarta: Skripsi Kearsipan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan